



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YOHANES TELAJAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
3. NHK : 851648

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 868 m2/81 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/144 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah Seluas 7906 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 5558 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 16460 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 9715 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 10.000.000
8. Tanah Seluas 9633 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
9. Tanah Seluas 7365 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 177.500.000

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000



2. MOTOR, HONDA HONDA SUPRA Tahun 2006, HASIL SENDIRI

Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 59.747

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.498.776

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 398.058.523

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 398.058.523

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.